

Pendidikan sebagai Pilar Negara: Analisis Prioritas Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Adisha Madhina Rahma¹, Zika Alzahra², Abdal³

¹²³UIN Sunan Gunung Djati Bandung

adishamr123@gmail.com¹, zikaalzahra95@gmail.com², abdal@uinsgd.ac.id³

ABSTRAK

Pendidikan merupakan pilar utama pembangunan bangsa, namun implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Penelitian ini bertujuan menganalisis posisi pendidikan sebagai pilar pembangunan negara, mendeskripsikan kondisi dan permasalahan pendidikan di Indonesia, mengevaluasi implementasi kebijakan pendidikan, menganalisis dampaknya terhadap pembangunan nasional, serta memberikan rekomendasi kebijakan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kajian literatur dan analisis kebijakan, menggunakan data sekunder dari BPS, Kemendikbudristek, laporan lembaga internasional, dan artikel jurnal ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun anggaran pendidikan Indonesia pada tahun 2025 mencapai Rp724,3 triliun atau 20 persen APBN, kualitas dan pemerataan pendidikan belum optimal. Skor PISA 2022 menempatkan Indonesia di peringkat ke-70 dari 81 negara, ketimpangan akses antara perkotaan dan perdesaan masih lebar, serta angka putus sekolah belum sepenuhnya teratasi. Kebijakan Kurikulum Merdeka, Dana BOS, dan Kartu Indonesia Pintar telah memberikan dampak positif, namun terkendala efektivitas implementasi dan pengawasan anggaran. Diperlukan sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan merata.

Kata kunci: Pendidikan; Kebijakan Public; Ketimpangan Pendidikan; Kualitas SDM; Pembangunan Nasional

ABSTRACT

Education is a primary pillar of national development; however, its implementation in Indonesia continues to face various structural challenges. This research aims to analyze the position of education as a pillar of national development, describe the current conditions and challenges of education in Indonesia, evaluate the implementation of education policies, analyze their impact on national development, and provide policy recommendations. The method employed is descriptive qualitative research using a literature review and policy analysis approach, drawing on secondary data from BPS, the Ministry of Education and Culture, international organizations, and scientific journals. The findings reveal that despite Indonesia's education budget reaching IDR 724.3 trillion in 2025, education quality and equity remain suboptimal. Indonesia ranked 70th out of 81

countries in PISA 2022, urban–rural access gaps persist, and school dropout rates have not been fully resolved. Policies such as the Merdeka Curriculum, School Operational Assistance, and the Indonesia Smart Card have yielded positive impacts but are constrained by implementation effectiveness and budget oversight. Synergy among government, schools, and society is essential to achieve equitable quality education.

Keywords: Education; Public Policy; Educational Inequality; Human Resource Quality; National Development

PENDAHULUAN

Berisi latar belakang studi dengan Pendidikan memiliki peran yang sangat penting sebagai fondasi utama dalam pembangunan suatu negara. Melalui proses pendidikan, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, kompetitif, serta mampu berkontribusi terhadap kemajuan berbagai bidang kehidupan. Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, pendidikan dan pembangunan memiliki hubungan yang saling mendukung. Pendidikan berperan dalam menghasilkan tenaga kerja yang kompeten untuk menunjang proses pembangunan, sedangkan hasil pembangunan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan secara berkelanjutan (Syamsurijal, 2023).

Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa memiliki peluang besar untuk memanfaatkan bonus demografi sebagai modal pembangunan nasional. Namun, peluang tersebut hanya dapat diwujudkan apabila didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang unggul melalui pendidikan yang berkualitas.

Dunia pendidikan Indonesia hingga kini masih dihadapkan pada sejumlah persoalan yang belum terselesaikan. Hal ini tercermin salah satunya dari capaian Indonesia dalam asesmen PISA 2022, yang mengukur kemampuan membaca, berhitung, dan sains siswa di berbagai negara. Hasilnya memperlihatkan bahwa kompetensi literasi maupun numerasi pelajar Indonesia masih tertinggal dari standar global. Khusus dalam bidang sains, Indonesia hanya mampu meraih skor 366 dan menduduki posisi ke-70 dari total 81 negara yang ikut serta (Silambona, 13). Realitas ini menegaskan bahwa mutu pendidikan di tanah air masih membutuhkan pembenahan serius agar dapat melahirkan generasi yang siap bersaing di kancah internasional.

Persoalan lain yang tak kalah mendasar adalah kesenjangan akses pendidikan antara masyarakat di wilayah perkotaan dan pedesaan. Merujuk pada data BPS per Maret 2023, tercatat sekitar 5,11% warga desa yang sama sekali tidak pernah mengenyam bangku sekolah, angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan penduduk kota yang hanya 1,93%. Dari sisi jenjang pendidikan, hanya 27,98% penduduk desa yang berhasil menyelesaikan pendidikan setingkat SMA, sementara di perkotaan angka tersebut mencapai 49,16%. Adapun angka putus sekolah di tingkat SMA pada tahun ajaran 2024/2025 masih berada di angka 0,86%, dengan jumlah siswa yang berhenti sekolah secara nasional sebanyak 66.866 orang, meski angka ini terbilang menurun dibandingkan periode sebelumnya (Rendaniati, 2025).

Situasi di atas memunculkan sebuah ironi yang patut dicermati. Di satu sisi, pemerintah secara konsisten menggelontorkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU Sisdiknas, dengan nominal yang mencapai Rp724,3 triliun pada tahun 2025, angka tertinggi sepanjang sejarah penganggaran nasional (Nugroho, 2024). Namun di sisi lain, perbaikan nyata dalam hal mutu maupun pemerataan layanan pendidikan belum benar-benar terwujud secara merata. Oleh karena itu, upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan Indonesia dari negara-negara lain menjadi prioritas yang mendesak, dan memerlukan kajian yang komprehensif terhadap akar masalahnya sekaligus evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan kebijakan yang telah berjalan.

KAJIAN TEORI

Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat (Dye, 2017). Definisi tersebut menegaskan bahwa tindakan maupun ketidaktindakan pemerintah sama-sama memiliki konsekuensi terhadap kehidupan publik. Oleh karena itu, kebijakan publik harus dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat, didukung oleh data yang memadai, dan memiliki tujuan yang jelas agar dapat memberikan manfaat yang optimal.

Dalam bidang pendidikan, kebijakan publik menjadi instrumen penting untuk meningkatkan akses, mutu, pemerataan, dan relevansi pendidikan. Berbagai program pemerintah seperti bantuan pendidikan, peningkatan kompetensi guru, dan pengembangan kurikulum merupakan bentuk implementasi kebijakan publik yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan kebijakan

tersebut sangat ditentukan oleh kesesuaian antara tujuan kebijakan, kebutuhan masyarakat, dan kapasitas pemerintah dalam melaksanakannya.

Teori *Human Capital*

Teori *Human Capital* menjelaskan bahwa pendidikan merupakan bentuk investasi yang dapat meningkatkan kualitas individu melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi. Investasi tersebut pada akhirnya akan menghasilkan manfaat ekonomi berupa peningkatan produktivitas kerja, pendapatan, serta pertumbuhan ekonomi suatu negara (Patrinos & Psacharopoulos, 2020).

Patrinos dan Psacharopoulos menegaskan bahwa investasi pendidikan memberikan tingkat pengembalian yang positif bagi individu maupun masyarakat. Hasil kajian mereka menunjukkan bahwa tambahan pendidikan berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan tenaga kerja di berbagai negara. Pendidikan juga berperan dalam meningkatkan kemampuan individu untuk beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan pasar kerja yang semakin dinamis.

Dalam konteks pembangunan nasional, teori human capital menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan tidak dapat dipandang sebagai biaya semata, melainkan investasi jangka panjang untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Semakin tinggi kualitas pendidikan yang diterima masyarakat, semakin besar peluang peningkatan daya saing tenaga kerja, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang efektif menjadi salah satu faktor utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menekankan makna, proses, dan interpretasi terhadap suatu permasalahan. Sementara itu, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta serta karakteristik objek yang diteliti (Sugiyono, 2013).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur (*literature review*) dan analisis kebijakan (*policy analysis*). Kajian literatur

digunakan untuk mengidentifikasi, menelaah, dan mensintesis berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan topik pendidikan dan kebijakan publik di Indonesia. Kajian literatur merupakan proses menelaah penelitian dan dokumen yang telah ada untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai suatu fenomena (Creswell, 2017). Sementara itu, analisis kebijakan digunakan untuk menilai efektivitas suatu kebijakan dalam menyelesaikan masalah publik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dihimpun dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, mencakup dokumen resmi instansi pemerintah, laporan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga internasional, serta publikasi ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran terhadap berbagai catatan, laporan, arsip, dan dokumen yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Seluruh dokumen yang berhasil dikumpulkan kemudian dipilah, dikelompokkan, dan dikaji secara mendalam berdasarkan tingkat relevansinya terhadap isu prioritas kebijakan di bidang pendidikan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan sebagai Pilar Pembangunan Negara

Pendidikan dapat dipahami sebagai suatu proses yang diselenggarakan secara terstruktur dan bertujuan untuk menumbuhkembangkan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berbudi pekerti luhur, berilmu, kreatif, mampu berdiri sendiri, serta siap berperan aktif dalam kehidupan sosial dan kebangsaan. Hal ini sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam kerangka pembangunan suatu bangsa, pendidikan tidak semata-mata berperan sebagai medium penyampaian ilmu pengetahuan, melainkan juga sebagai penggerak lahirnya inovasi serta kemajuan di berbagai sektor kehidupan.

Apabila ditinjau dari perspektif ekonomi pembangunan, pendidikan kerap ditempatkan sebagai bentuk investasi dalam sumber daya manusia yang memberikan dampak positif secara berkelanjutan, baik bagi individu yang bersangkutan maupun bagi kemajuan negara secara keseluruhan. Penanaman investasi di sektor pendidikan dinilai mampu mendorong peningkatan kualitas

angkatan kerja, mengangkat tingkat produktivitas, serta memperkuat daya saing perekonomian nasional di tengah persaingan global.

Penelitian yang dilakukan oleh Patrinos dan Psacharopoulos, menunjukkan bahwa setiap tambahan satu tahun pendidikan berpotensi meningkatkan pendapatan individu secara signifikan. Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Patrinos & Psacharopoulos, 2020).

SDM yang terdidik memiliki kemampuan untuk meningkatkan produktivitas kerja, menciptakan inovasi baru, serta mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan dalam pasar ekonomi modern. Ketika generasi muda memiliki literasi, numerasi, dan keterampilan yang memadai, mereka dapat berkontribusi lebih efektif terhadap pertumbuhan ekonomi, baik melalui peningkatan kualitas tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja baru, maupun daya saing bangsa dalam ekonomi global (Budiana & Pastika, 2025).

Kondisi dan Permasalahan Pendidikan di Indonesia

Berdasarkan hasil kajian, terdapat beberapa permasalahan utama yang masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Permasalahan tersebut meliputi ketimpangan akses pendidikan, rendahnya kualitas pembelajaran, persoalan tenaga pendidik, serta faktor ekonomi dan sosial yang memengaruhi keberlangsungan pendidikan masyarakat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan menengah atas di wilayah perkotaan mencapai 49,16%, sedangkan di wilayah perdesaan hanya sebesar 27,98%. Selain itu, masih terdapat 5,11% penduduk desa yang belum pernah atau tidak mengenyam pendidikan formal (BPS, 2023).

Kondisi ini menunjukkan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang layak belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Ketimpangan tersebut juga diperburuk oleh keterbatasan akses terhadap teknologi informasi dan internet, terutama di daerah terpencil, padahal pemanfaatan teknologi menjadi aspek penting dalam sistem pendidikan modern.

Permasalahan kedua adalah rendahnya kualitas pembelajaran. Hasil PISA 2022 menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi peserta didik Indonesia masih berada di bawah rata-rata internasional (Silambona, 13). Hal ini

mengisyaratkan bahwa kegiatan pembelajaran yang berlangsung selama ini belum cukup mampu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, bernalar analitis, maupun menyelesaikan masalah secara mandiri. Salah satu faktor yang turut melatarbelakangi kondisi tersebut adalah pendekatan pengajaran yang masih didominasi oleh pola menghafal, bukan pemahaman mendalam.

Permasalahan ketiga berkaitan dengan tenaga pendidik. Distribusi guru di Indonesia masih belum merata, sehingga daerah terpencil sering mengalami kekurangan tenaga pengajar yang berkualitas (Juwita, 2025). Meskipun pemerintah telah menjalankan berbagai program peningkatan kompetensi guru, seperti Program Guru Penggerak, implementasinya belum menjangkau seluruh wilayah secara optimal.

Adapun persoalan keempat berkaitan dengan dimensi ekonomi dan sosial masyarakat. Kondisi keuangan keluarga yang terbatas masih menjadi hambatan terbesar yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi pendidikan sekaligus tingginya angka siswa yang terpaksa berhenti sekolah. Di luar biaya pendidikan itu sendiri, pengeluaran untuk kebutuhan penunjang seperti seragam, alat tulis, dan ongkos transportasi pun kerap memberatkan keluarga dengan penghasilan minim, sehingga keberlangsungan pendidikan anak menjadi terganggu (Edo & Yasin, 2024).

Analisis Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah menggulirkan berbagai kebijakan strategis di bidang pendidikan. Analisis berikut menelaah beberapa kebijakan utama dari aspek tujuan, implementasi, efektivitas, dan hambatannya.

Pertama yaitu program Wajib Belajar dan Dana BOS. Program wajib belajar yang telah diperluas menjadi 12 tahun bertujuan memastikan seluruh anak Indonesia mengakses pendidikan dasar dan menengah. Sebagai penunjangnya, Dana BOS dialokasikan untuk meringankan beban biaya operasional sekolah. Kebijakan ini berkontribusi terhadap tingginya partisipasi pendidikan anak usia sekolah (Putra, 2022). Namun transparansi penggunaan dana dan ketepatan sasaran masih menjadi catatan evaluasi yang memerlukan perbaikan sistem pengawasan.

Kebijakan kedua yang patut disoroti adalah Kurikulum Merdeka, yang hadir sebagai langkah terobosan dalam upaya mentransformasi praktik pembelajaran di Indonesia. Melalui inisiatif Merdeka Belajar, satuan pendidikan diberikan ruang yang lebih luas untuk merancang proses pembelajaran yang disesuaikan dengan

karakteristik serta kebutuhan masing-masing siswa, dengan tetap mengutamakan penguatan kemampuan literasi, numerasi, dan pembentukan karakter (Tunas & Pangkey, 2024). Meski demikian, kesiapan para guru dalam menerapkan kurikulum ini secara konsisten dan menyeluruh masih menghadapi berbagai kendala di tingkat implementasi. Dalam hal ini, keberadaan guru penggerak dinilai memegang peranan yang sangat signifikan dalam memastikan Kurikulum Merdeka dapat berjalan secara efektif sekaligus mendorong tumbuhnya motivasi belajar siswa.

Ketiga adalah program Kartu Indonesia Pintar (KIP). KIP merupakan program bantuan sosial di bidang pendidikan yang bertujuan mengurangi beban finansial keluarga kurang mampu. Program ini mampu menaikkan angka partisipasi kasar dan partisipasi murni pendidikan. Namun, dampak KIP hanya bersifat sementara dan tidak efektif menghilangkan akar persoalan putus sekolah yang lebih bersifat struktural (Rahawarin, Ahmad, & Rochimah, 2025). Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang mengatasi penyebab multidimensi dari putus sekolah.

Persoalan mendasar yang melintas di balik semua kebijakan tersebut adalah persoalan efektivitas anggaran. Meskipun Indonesia mengalokasikan Rp665 triliun (20% APBN) pada 2024, yang penggunaannya untuk sektor pendidikan masih perlu dipertanyakan lebih lanjut (Munthe, Purba, Tamba, Napitu, & Sinaga, 2025). Dengan kata lain, anggaran pendidikan yang besar secara nominal belum secara langsung berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pendidikan di lapangan.

Dampak Pendidikan terhadap Pembangunan Nasional

Kualitas pendidikan memiliki dampak yang sangat luas terhadap berbagai aspek pembangunan nasional. Pertama, dari sisi ekonomi, Patrinos dan Psacharopoulos (2020) secara konsisten menunjukkan hubungan positif antara tingkat pendidikan dan pendapatan individu, serta antara rata-rata lama sekolah suatu negara dan pertumbuhan ekonominya. Setiap tambahan satu tahun pendidikan dapat meningkatkan penghasilan individu rata-rata sekitar 9%, dengan imbal hasil yang lebih tinggi di negara-negara berkembang. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar hak asasi, melainkan investasi strategis bagi pembangunan nasional (Patrinos & Psacharopoulos, 2020).

Kedua, pendidikan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. rendahnya kualitas pendidikan yang dialami anak-anak saat ini akan berdampak pada produktivitas dan penghasilan mereka di masa depan, yang pada

gilirannya memperbesar risiko kemiskinan antargenerasi (Maharani, Ningrum, Fatmawati, & Fadilla, 2024). Dengan demikian, investasi pendidikan yang tidak merata justru akan memperlebar jurang ketimpangan yang ada.

Ketiga, Pendidikan berperan penting dalam mendorong kemajuan teknologi dan inovasi. Negara-negara yang berinvestasi besar dalam pendidikan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika (STEM) umumnya memiliki kemampuan lebih kuat dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan, menghasilkan tenaga kerja terampil, serta meningkatkan daya saing ekonomi di tingkat global (Uzma, 2025).

Keempat, pendidikan berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan kohesi kebangsaan. Pendidikan berkualitas menghasilkan SDM dengan kreativitas dan solidaritas sosial yang tinggi. Sebaliknya, ketimpangan akses pendidikan berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan fragmentasi yang mengancam persatuan nasional (Aini, Komalasari, Husna, & Hidayati, 2025).

Rekomendasi dan Solusi Kebijakan

Berdasarkan analisis di atas, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Pertama, pemerataan fasilitas pendidikan perlu menjadi prioritas utama, khususnya di daerah-daerah 3T. Pemerintah perlu memastikan setiap sekolah memiliki infrastruktur fisik dan digital yang layak sebagai prasyarat pembelajaran berkualitas. Percepatan pembangunan konektivitas digital di wilayah terpencil menjadi mendesak mengingat sentralnya peran teknologi dalam pembelajaran modern.

Kedua, evaluasi mendalam dan komprehensif terhadap efektivitas setiap program kebijakan pendidikan perlu dilembagakan. Besarnya anggaran pendidikan yang digelontorkan seharusnya diiringi dengan sistem monitoring dan evaluasi yang kuat untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas belajar siswa.

Ketiga, penguatan pendidikan. Kurikulum dan metode pembelajaran perlu terus dikembangkan untuk memupuk kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif pada siswa, sejalan dengan tuntutan era ekonomi digital. Inovasi kurikulum harus disertai dengan implementasi yang efektif di satuan-satuan pendidikan agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh peserta didik (Tunas & Pangkey, 2024).

Keempat, pengawasan penggunaan anggaran pendidikan perlu diperkuat, terutama untuk Dana Transfer ke Daerah, agar memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan tidak mengalami penyimpangan pemanfaatan. Pada akhirnya, perbaikan pendidikan memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam membangun ekosistem pendidikan yang berkualitas, relevan, dan inklusif bagi seluruh anak bangsa.

SIMPULAN

Pendidikan memegang posisi sentral dan strategis sebagai pilar pembangunan negara. Kajian ini menegaskan bahwa investasi dalam pendidikan berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, kemajuan teknologi, dan stabilitas sosial, sebagaimana ditunjukkan oleh Patrinos dan Psacharopoulos (2020).

Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa sistem pendidikan Indonesia masih jauh dari optimal. Ketimpangan akses antara desa dan kota, rendahnya capaian literasi dan numerasi, permasalahan distribusi dan kualitas guru, serta faktor kemiskinan yang mengancam keberlangsungan sekolah anak merupakan tantangan yang memerlukan penanganan serius dan sistematis.

Kebijakan-kebijakan yang telah dijalankan seperti Kurikulum Merdeka, Dana BOS, KIP, program Guru Penggerak, dan digitalisasi Pendidikan, menunjukkan komitmen pemerintah yang patut diapresiasi. Meski demikian, kesenjangan antara ambisi kebijakan dan implementasi di lapangan masih menjadi persoalan utama. Ke depan, reformasi pendidikan Indonesia memerlukan pendekatan yang mengutamakan pemerataan fasilitas, penguatan kapasitas guru, kurikulum yang relevan, pengawasan anggaran yang ketat, serta keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Hanya dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat, cita-cita mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh anak bangsa dapat dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, F., Komalasari, K., Husna, N., & Hidayati, M. (2025). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Harmonisasi Sosial. *Jurnal Soshum Insentif*, 8(2), 114-125.
- BPS. (2023). *Statistik Pendidikan*. BPS.

- Budiana, I. K., & Pastika, I. W. (2025). Kajian Dampak Pendidikan Terhadap Kemajuan Ekonomi. *Journal of Economics Development Research*, 1(3), 122-130. <https://doi.org/10.71094/joeder.v1i3.148>.
- Creswell, J. W. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Dye, T. R. (2021). *Understanding Public Policy* (16th ed.). New York: Pearson.
- Edo, A., & Yasin, M. (2024). Dampak kesenjangan akses pendidikan dan faktor ekonomi keluarga terhadap mobilitas sosial. *Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial (SINOVA)*, 2(3), 317-326.
- Juwita, T. (2025, November 17). *Benarkah Distribusi Guru Belum Merata di Indonesia?* Diambil kembali dari Goodstats: <https://goodstats.id/article/benarkah-distribusi-guru-belum-merata-di-indonesia-a9Dbp>
- Maharani, C., Ningrum, D. A., Fatmawati, A. E., & Fadilla, A. (2024). Dampak kemiskinan terhadap kualitas pendidikan anak di Indonesia: Rekomendasi kebijakan yang efektif. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(3), 1-10.
- Munthe, R. P., Purba, J. A., Tamba, A. A., Napitu, K. A., & Sinaga, E. (2025). Analisis Pengeluaran Apbn Pada Bidang Pendidikan Dan Perkembangan Penerima Kip Mahasiswa Tahun 2022–2025. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 2(6), 401-410.
- Nugroho, R. A. (2024, November 29). *Anggaran Pendidikan 2025 Tertinggi dalam Sejarah, Ini Rinciannya!* Diambil kembali dari cnbc indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241129111850-4-592105/anggaran-pendidikan-2025-tertinggi-dalam-sejarah-ini-rinciannya>
- Patrinos, H. A., & Psacharopoulos, G. (2020). Returns to education in developing countries. *The economics of education*, 53-64.
- Putra, R. (2022). Evaluasi keberhasilan realisasi dana BOS sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 6(1), 115-131.
- Rahawarin, B., Ahmad, M., & Rochimah, H. (2025). Efektivitas Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Dalam Mengurangi Siswa Putus Sekolah: Tinjauan Literatur. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 12(4), 1053-1067.
- Rendaniati, A. (2025, November 26). *Jenjang SMA Sederajat Dominasi Angka Putus Sekolah 2025*. Diambil kembali dari goodstats: <https://data.goodstats.id/statistic/jenjang-sma-sederajat-dominasi-angka-putus-sekolah-2025-QrI6P>
- Silambona. (13, Desember 2025). *Skor PISA Indonesia Masih Rendah, Dikhawatirkan Disalip Vietnam-Timor Leste*. Diambil kembali dari

- detik.com: <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-8257399/skor-pisa-indonesia-masih-rendah-dikhawatirkan-disalip-vietnam-timor-leste>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsurijal, S. (2023). Titik temu pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia berdaya saing. . *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 3(03), 545-553.
- Tunas, K. O., & Pangkey, R. D. (2024). Kurikulum Merdeka: Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan kebebasan dan fleksibilitas. *Journal on Education*, 6(4), 22031-22040.
- Uzma, H. N. (2025, Mei 20). *Transformasi Pendidikan Berbasis STEM Kunci Generasi Indonesia Emas*. Diambil kembali dari detikedu: <https://www.detik.com/edu/edutainment/d-7923322/transformasi-pendidikan-berbasis-stem-kunci-generasi-indonesia-emas>